



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 110
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 110 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 110 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 110 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 110), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	N A M A	J A R A T A N	P A R A F
1	DR.H.SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DR.H.ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARD HUKUM	
4	DR.H.ABDUL MAQJID S, M.Si	KARD ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 84

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. ZAHUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a final flourish.

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 84

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 84 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
 110 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
 KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	2) Pengemudi				1		
	3) Operator Speedboat				2		
	4) Analis Barang Milik Negara				1		
	5) Pengadministrasi Umum				1		
	6) Petugas Keamanan				1		
	7) Analis Data dan Informasi				1		
	b. Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Analis Perencanaan				1		
	3) Verifikator Keuangan				1		
	4) Analis Pengelolaan Keuangan				1		
	5) Analis Data dan Informasi				1		
	6) Pengolah Data Perencanaan Penganggaran				1		
	7) Pengelola Statistik Perikanan				1		

2.	Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut		1			
	a. Kepala Seksi Perencanaan Ruang Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			1		
	1) Analis Potensi Kelautan				1	
	2) Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha				1	
	b. Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			1		
	1) Analis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir				1	
	2) Analis Kelautan dan Perikanan				1	
	c. Kepala Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan dan Perikanan			1		
	1) Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir				1	
	2) Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan				1	
3.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap		1			
	a. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan			1		
	1) Analis Pengelolaan Sumber Daya Ikan				1	
	2) Analis Pendaftaran Kapal Perikanan				1	
	b. Kepala Seksi Kenelayanan dan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan			1		
	1) Analis Kenelayanan				1	
	2) Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan				1	
	c. Kepala Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan Sarana Prasarana			1		
	1) Analis Pembangunan Pelabuhan Perikanan				1	
	2) Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan				1	
4.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk dan Pengawasan SDK Perikanan		1			
	a. Kepala Seksi Perikanan Budidaya			1		
	1) Analis Budidaya Perikanan				2	
	2) Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan				1	

	b. Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan		1			
	1) Analis Mutu Hasil Perikanan			1		
	2) Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan			1		
	c. Kepala Seksi Pengawasan SDK dan Perikanan		1			
	1) Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			1		
	2) Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan			1		
5.	Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha		1			
	1) Analis Perencanaan			1		
	2) Pengadministrasi Umum			1		
	3) Pengadministrasi Keuangan			1		
	4) Pengemudi			1		
	5) Petugas Keamanan			2		
	6) Bendahara			1		
	7) Pengelola Barang Milik Negara			1		
	b. Kepala Seksi Penerapan Mutu		1			
	1) Analis Mutu Hasil Perikanan			1		
	2) Analis Kelautan dan Perikanan			2		
	c. Kepala Seksi Pengujian		1			
	1) Analis Mutu Hasil Perikanan			1		
	2) Analis Kimia			1		
6.	Kepala UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau	1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha		1			
	1) Analis Perencanaan			2		
	2) Pengemudi			1		
	3) Petugas Keamanan			2		
	4) Bendahara			1		
	5) Pengelola Barang Milik Negara			1		
	6) Pengadministrasi Umum			1		
	b. Kepala Seksi Budidaya Laut		1			
	1) Analis Benih			2		
	2) Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan			1		

	c. Kepala Seksi Budidaya Payau			1		
	1) Analis Benih				2	
	2) Analis Kimia				2	
	3) Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan				1	
7.	Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Tenggayu II	1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha		1			
	1) Analis Perencanaan				1	
	2) Pengadministrasi Umum				1	
	3) Bendahara				1	
	4) Pengemudi				1	
	5) Petugas Keamanan				3	
	6) Operator Speedboat				1	
	7) Penagih Retribusi				3	
	8) Pengelola Barang Milik Negara				1	
	b. Kepala Seksi Tata Operasional		1			
	1) Analis Kelautan dan Perikanan				1	
	2) Pengadministrasi Kedatangan dan Pemberangkatan Kapal				1	
	3) Syahbandar Pelabuhan Perikanan				2	
	c. Kepala Seksi Pengembangan		1			
	1) Analis Pembangunan Pelabuhan Perikanan				2	
	2) Analis Sistem Informasi				2	
	JABATAN FUNGSIONAL					
	a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
	1) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pertama					3
	2) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Muda					3
	3) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Madya					3
	b. Analis Pasar Hasil Perikanan					
	1) Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama					1
	2) Analis Pasar Hasil Perikanan Muda					1
	c. Pengawas Perikanan					
	1) Pengawas Perikanan Pertama					3
	2) Pengawas Perikanan Muda					3
	3) Pengawas Perikanan Madya					3

d. Pengelola Kesehatan Ikan						
1) Pengelola Kesehatan Ikan Pertama					1	
2) Pengelola Kesehatan Ikan Muda					1	
3) Pengelola Kesehatan Ikan Madya					1	
Jumlah	1	7	20	82	23	
Jumlah Total			133			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






IRIANTO LAMBRIE

d. Pengelola Kesehatan Ikan						
1) Pengelola Kesehatan Ikan Pertama					1	
2) Pengelola Kesehatan Ikan Muda					1	
3) Pengelola Kesehatan Ikan Madya					1	
Jumlah	1	7	20	82	23	
Jumlah Total			133			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	DR. H. SURIMANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.SI	ASISTEN ADMINISTRASI UMLUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAQJID S, M.SI	KARO ORGANISASI	

d. Pengelola Kesehatan Ikan						
1) Pengelola Kesehatan Ikan Pertama					1	
2) Pengelola Kesehatan Ikan Muda					1	
3) Pengelola Kesehatan Ikan Madya					1	
Jumlah	1	7	20	82	23	
Jumlah Total			133			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 84

No	NAMA	JABATAN	PARA
1	DRS.H.ZAHUDDIN H2,MSi	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, CH	PLT KARD HUKUM	
3	DRS.H.ABDUL MAQJID C, M.Si	KARD ORGANISASI	

d. Pengelola Kesehatan Ikan						
1) Pengelola Kesehatan Ikan Pertama					1	
2) Pengelola Kesehatan Ikan Muda					1	
3) Pengelola Kesehatan Ikan Madya					1	
Jumlah	1	7	20	82	23	
Jumlah Total			133			

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

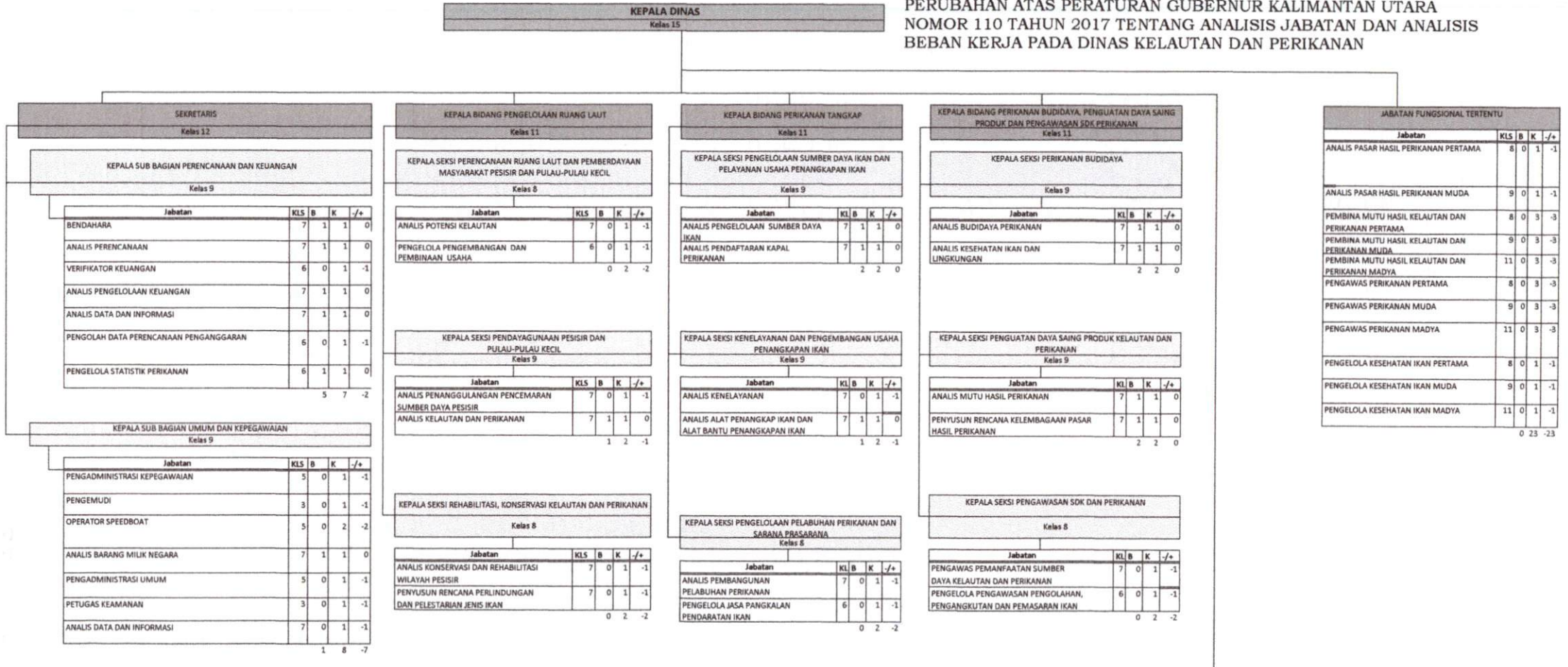
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

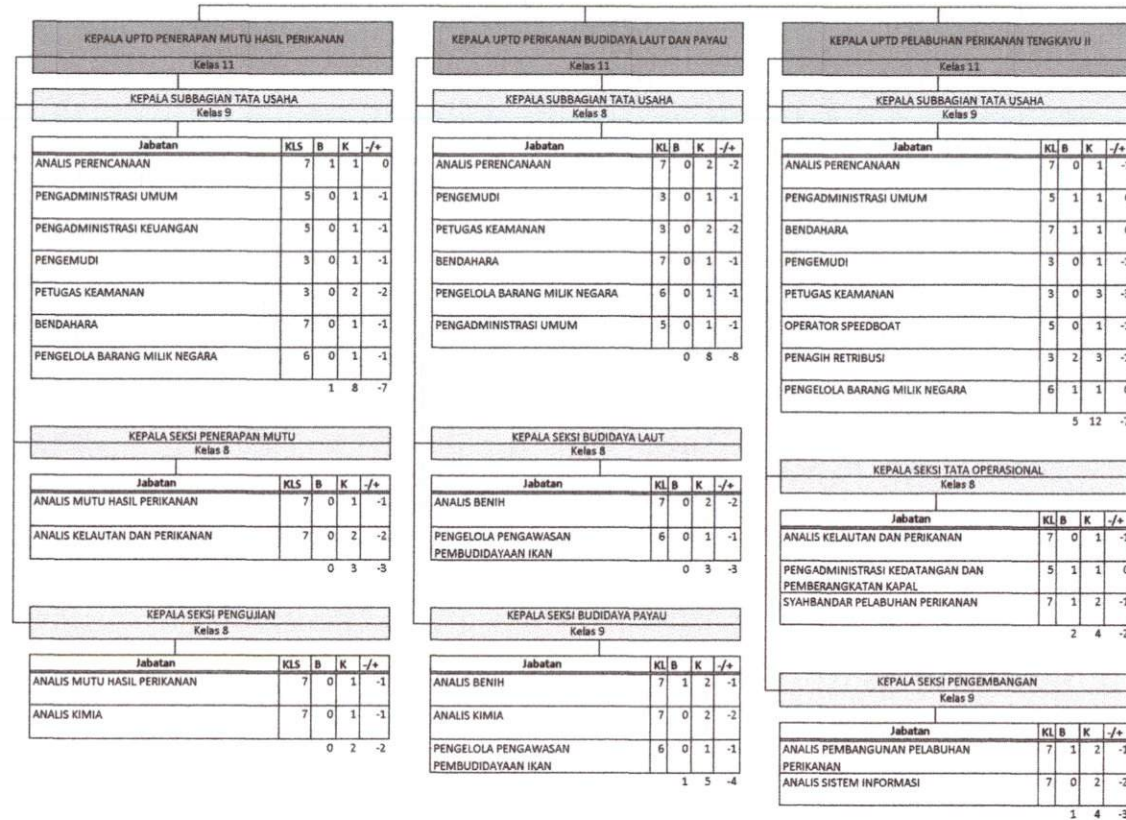
PETA JABATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	6	7	-1
Eselon IV	16	20	-4
JFT	0	23	-23
JFU	24	82	-58
Kurang	47	133	-86

Beban Kerja:
1. ...
2. ...



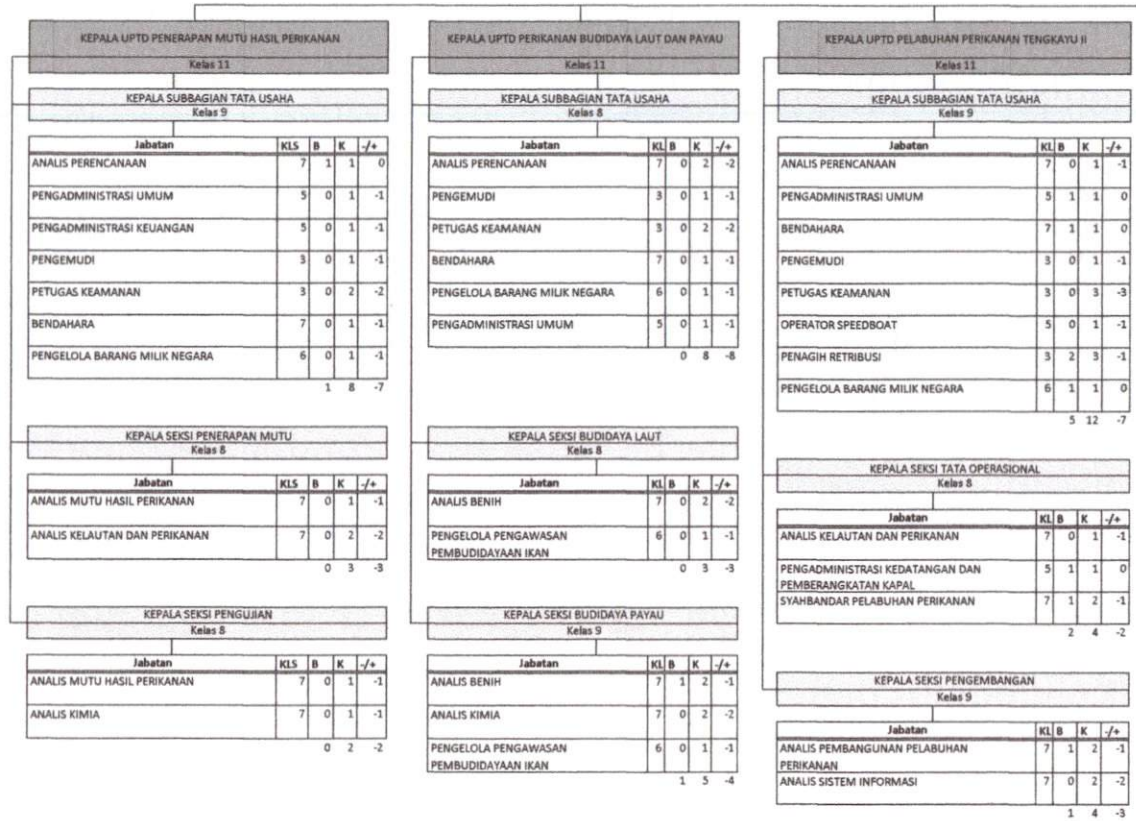
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	6	7	-1
Eselon IV	16	20	-4
JFT	0	23	-23
JFU	24	82	-58
Kurang	47	133	-86




Beban Kerja
1. ...
2. ...



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

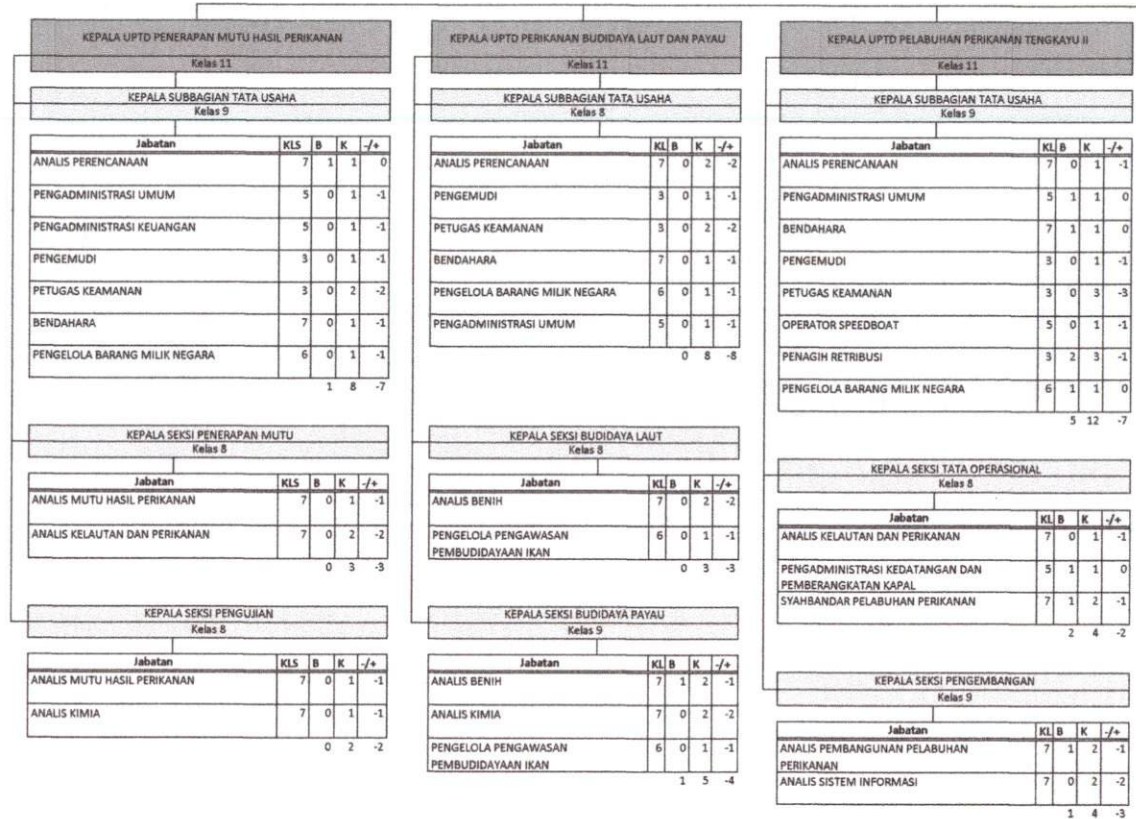
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAIMUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAJID S, M. Si	KARO ORGANISASI	

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	6	7	-1
Eselon IV	16	20	-4
JFT	0	23	-23
JFU	24	82	-58
Kurang	47	133	-86

Deban Kerja:
1. ...
2. ...



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SORIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 84

No	ASISTEN	ADMINISTRASI UMUM
1	Drs.H. ZAINUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLt. KARO HUKUM
3	Drs.H. ABDUL MAQJID S, M. Si	KARO ORGANISASI

Rekapitulasi	Jumlah		
	B	K	+/-
Eselon II	1	1	0
Eselon III	6	7	-1
Eselon IV	16	20	-4
JFT	0	23	-23
JFU	24	82	-58
Kurang	47	133	-86

Beban Kerja	
1. ...	2. ...

KEPALA UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN				
Kelas 11				
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PERENCANAAN	7	1	1	0
PENGADMINISTRASI UMUM	5	0	1	-1
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	0	1	-1
PENGENMUDI	3	0	1	-1
PETUGAS KEAMANAN	3	0	2	-2
BENDAHARA	7	0	1	-1
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	0	1	-1
				1 8 -7

KEPALA SEKSI PENERAPAN MUTU				
Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN	7	0	1	-1
ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	0	2	-2
				0 3 -3

KEPALA SEKSI PENGUJIAN				
Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN	7	0	1	-1
ANALIS KIMIA	7	0	1	-1
				0 2 -2

KEPALA UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU				
Kelas 11				
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA				
Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PERENCANAAN	7	0	2	-2
PENGENMUDI	3	0	1	-1
PETUGAS KEAMANAN	3	0	2	-2
BENDAHARA	7	0	1	-1
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	0	1	-1
PENGADMINISTRASI UMUM	5	0	1	-1
				0 8 -8

KEPALA SEKSI BUDIDAYA LAUT				
Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS BENIH	7	0	2	-2
PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	6	0	1	-1
				0 3 -3

KEPALA SEKSI BUDIDAYA PAYAU				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS BENIH	7	1	2	-1
ANALIS KIMIA	7	0	2	-2
PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	6	0	1	-1
				1 5 -4

KEPALA UPTD PELABUHAN PERIKANAN TENGGAYU II				
Kelas 11				
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PERENCANAAN	7	0	1	-1
PENGADMINISTRASI UMUM	5	1	1	0
BENDAHARA	7	1	1	0
PENGENMUDI	3	0	1	-1
PETUGAS KEAMANAN	3	0	3	-3
OPERATOR SPEEDBOAT	5	0	1	-1
PENAGIH RETRIBUSI	3	2	3	-1
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	1	1	0
				5 12 -7

KEPALA SEKSI TATA OPERASIONAL				
Kelas 8				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	0	1	-1
PENGADMINISTRASI KEDATANGAN DAN PEMBERANGKATAN KAPAL SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN	7	1	2	-1
				2 4 -2

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN				
Kelas 9				
Jabatan	KLS	B	K	-/+
ANALIS PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN	7	1	2	-1
ANALIS SISTEM INFORMASI	7	0	2	-2
				1 4 -3

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH